

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalian Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Amrizal J. Prang, *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015.
- Astim Riyanto, *Teori Negara Kesatuan*, Yapemdo, Bandung, 2010.
- Axel Hadenius, *Decentralization and Democratic Governance Experiences from India, Bolivia and South Africa*, Sweden: Almqvist & Wiksell International, 2003.
- B. N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Barnet, Hilaire, *Constitutional and Administrative Law*, ed. 3, London: Cavendish Limited, 2000.
- CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahandari *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of*

- Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Darmansjah Djumala, *Soft Power Untuk Aceh, Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Ditjen PP, Jakarta, 2011.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet.11, Ihtiar Baru, Jakarta, 1989.
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, cet.10, Bina Cipta, Bandung, 1995.
- Hadenius, Axel, *Decentralization and Democratic Governance Experiences from India, Bolivia and South Africa*, Almqvist & Wiksell International, Sweden, 2003.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2007.
- Hilaire Barnet, *Constitutional and Administrative Law*, Ed. Ke-3, London: Cavendish Limited, 2000.
- Jazim Hamidi dan Budiman NDP Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, the Habibie Center, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, the Habibie Center, Jakarta, 2001.
- Jimly Assiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampane, Jakarta, 2005.
- K. Ramanathan, *Asas Sains Politik*, Fajar Bakti Sdn. Bhd., Selangor, Malaysia, 2003.
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia, dari Proklamasi Hingga Reformasi*, PT. Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2007.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar, dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet.10, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sarmandan Mohamad Taopik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet – 11, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta, 2009.

Yusnani Hasyimzoem dkk., *Hukum Pemerintahan Daerah*, ed. 1, cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pengawasan Peraturan Daerah.

MAKALAH, JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Faisal Akbar Nasution, Sumber-sumber Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Otonomi Daerah, *Disertasi*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

Fajri Nursyamsi, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.3, 2015, Bandung.

Mukhlis, "Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2014.

INTERNET, DLL.

Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Maria farida, *Hak Uji Materil Mahkamah Agung*, www.portal-justice.blogspot.com.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>, diakses pada hari rabu 20 November 2019.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>, diakses pada hari rabu 20 November 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3238417/mendagri-publikasikan-3143-perda-yang-dicabut-atau-direvisi-pemerintah>, diakses pada hari sabtu 4 Januari 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt519308777eeb0/masalah-dualisme-kewenangan-pengujian-perda-kabupaten-kota/>, diakses pada hari Jumat 3 Januari 2020.

<https://www.kompasiana.com/dianahijri/5d6e0178097f361bd772e992/optimalisasi-pengawasan-perda-kabupaten-kota-berdasarkan-permendagri-nomor-80-tahun-2015>, diakses pada hari kamis 2 Januari 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 137/PUU-XIII/2015.

Made Suwandi, <http://raconquista.files.wordpress.com/2009/04/minggu-ii-suwandi-konsepsiotda.pdf>.

https://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf, diakses pada hari sabtu 4 Januari 2020.